

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 14

TAHUN 1984

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 14 TAHUN 1984

TENTANG

PEMAKAIAN MOBIL JENASAH.

DENGAN HADMAT TUHAN YANG MANA ESA
BUPATI KEPADA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MENIMBANG

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam surat Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Nopember -
1978 Nomor : NK.023.5/2581/78 tentang penetapan Tarif
distribusi pemakaian Mobil ambulanee dan Mobil Jenasah -
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Paci-
tan tentang pemakaian Mobil Jenasah .

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Ert tahun 1957 .

Dengan paraetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Pacitan .

M E M U T U S K A N

MESETAPKAN

PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan -
tentang pemakaian Mobil Jenasah .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah:

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Dinas Kesehatan, ialah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. Kepala Dinas Kesehatan, ialah Kepala Dinas Kesehatan-Kabupaten Daerah Tingkat II Pasitan ;

- e. Mobil Jenasah, ialah Mobil Jenasah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- f. Daerah, ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan .

BAB II

TATA TAKSANA DAN PERIZINAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah menyediakan mobil jenaseah yang dapat dipergunakan oleh umum untuk mengangkut jenaseah didalam maupun keluar kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan .

Pasal 3

1. (1) Mobil jenaseah dapat dipakai setelah mendapat ijin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Permohonan ijin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diajukan secara tertulis atau lisan oleh ahli Waris atau orang yang diserahi untuk mengurus Jenasah kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk .
- (3) Permohonan ijin dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat ditolak jika Mobil Jenasah pada saat permohonan diajukan sedang dipakai atau terlebih dahulu sudah diminta penggunaanya oleh pihak lain atau dalam keadaan rusak.

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi pemakaian Mobil Jenasah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemakaian dalam Kota, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .
- b. Pemakaian Meluar Kota sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) setiap 5 Km pertama sedangkan kelebihannya dikenakan retribusi, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap Km.

Pasal 5

- (1) Retribusi teraebut pada ayat (4) Peraturan Daerah ini, su dan termasuk angkot bahan bakar, oli, Retribusi Kendaraan, Honorarium Sopir dan seorang Pembantunya ;

- (2) Bagi pemakai yang kurang mampu yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat tempat tinggal penderita dikenakan retribusi sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (3) Retribusi pemakaian Mobil Jenasah harus dibayar tunai kepada Bendaharawan Ilmae Kecamatan .
- (4) Yang dapat dibebaskan dari ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, ialah penderita yang tidak mampu yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat tempat tinggal yang bersangkutan dan/atau bagi penderita karena bencana alam .

Pasal 6

Jika Mobil jenazah serta sopir/pembantunya sampai bermalam diluar Kota atas permintaan pemakai maka jumlah retribusi dimaksud dalam Pasal 4 ditambah uang pengelapan dan uang makan, sebesar yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I, kecuali kalau rusak di tengah jalan .

Pasal 7

Setelah selesai dipakai, mobil jenazah harus segera kembali ke pangkalan agar dapat dipakai sewaktu-waktu.

BAB V

KETENTUAN PIDAKA

Pasal 8

Bagi Pemakai Mobil jenazah yang tidak mematuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebagaimana banyaknya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) atau hukuman setiuggi-tingginya 3 bulan .

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN PENUTUP

Pasal 9

Bah-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kopala Daerah .

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama seau-
dah dilundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Da-
erah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 1 Tahun 1959
dengan segala perubahannya, diangkatkan tidak berlaku lagi.

Pacitan, 4 - Nopember - 1980

BEBAN PERWAKILAH RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN

Cap, ttd,

Cap, ttd.

H. SOEJITNO, BA.-

IMAM HANAPIE.-

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ting-
kat I Jawa Timur tanggal, 7 Maret 1981 Nomor 68/P tahun 1981

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

WARSITO RASMAN, MA

NIP.010015749.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Pacitan tahun 1981 Seri 0 Nomor 1/G pada tanggal, 6 Jani -
1981 .

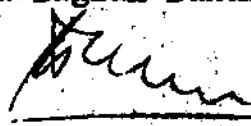
A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN
Sekretaris Wilayah/Daerah,

Cap. ttd.

HAROEN ALRASJID.-

NIP. 510006346.

Sosuai dengan aselinya
Kepala Bagian Buku,


SOEKIRNO, SH., MM.
NIP. 010059854

P E N J E L A S A N

Atas

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 14 TAHUN 1980

TENTANG

PEMAKAIAN MOBIL JENASAH

PENJELASAN UMUM :

Bahwa dengan teliti dapat disediakannya mobil khusus untuk mengangkut jenazah oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, maka perlu diadakan pengaturan pemakaiannya.

Oleh karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Pacitan Nomor 1 tahun 1959 tentang pemakaian mobil jenazah, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Surat Gubernur Republik Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Nopember 1978 Nomor HK.023.5/2581/1978 tentang penetapan Tarif Tribusi pemakaian mobil ambulans dan mobil jenazah dalam Peraturan Daerah Tingkat II, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 4 tahun 1980 tentang pemakaian mobil jenazah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

PENJELASAN UMUM :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Yang dimaksud dalam Kota Pacitan, sedang yang dimaksud 5 Km Pertama adalah 5 Km dari batas Kedamatan Kota Pacitan.

Pasal 5 sampai dengan 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.